
DARI MESIR HINGGA ALJAZAIR: JALAN PANJANG DIPLOMASI INDONESIA MENUJU KONFERENSI ASIA AFRIKA KEDUA (1955-1965)

FROM EGYPT TO ALGERIA: THE LONG ROAD OF INDONESIAN DIPLOMACY TOWARDS THE SECOND ASIAN AFRICAN CONFERENCE (1955-1965)

Ayu Wulandari

Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Jln. Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
ayuwulandari.99@mail.ugm.ac.id

Diterima tanggal 1 Februari 2022

Disetujui tanggal 26 Agustus 2022

ABSTRACT

This research discusses Indonesian diplomatic role in pursuing the implementation of the Second Asian-African Conference (AAC) in 1965 in Algeria. This study is motivated by the limited historiography highlighting Indonesian central role in encouraging the implementation of the second conference. In fact, organizing the conference was one of the Indonesian Government efforts to repeat the success of the first Asian-African Conference in Bandung in 1955. The national political interests were also the reason behind this diplomatic effort. This research used historical method with archive, magazine, and newspaper as sources. This study aims to analyze the Government's efforts, challenges, and the social and political conditions. The results show that Indonesia had initiated and prepared the second conference for almost a decade (1955-1965). The venue had even changed for several times: from Egypt to Algeria. Despite a long diplomatic process, this conference was canceled due to the unfavorable regional and international political situation. The novelty of this study is Indonesian diplomatic patterns and actions towards the implementation of the Second AAC, such as personal diplomacy efforts, political safaris, and diplomatic meetings.

Keywords: *Indonesian diplomacy, Second Asian African Conference, Afro-Asian solidarity, Algeria, and Egypt.*

ABSTRAK

Kajian ini membahas peran diplomatik Indonesia dalam mengupayakan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) Kedua pada 1965 di Aljazair. Kajian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya historiografi yang menyoroti peran sentral Indonesia dalam mendorong pelaksanaan KAA Kedua. Upaya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) Kedua sebenarnya adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mengulang kembali

kesuksesan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada 1955. Selain itu, kepentingan politik nasional Indonesia juga menjadi alasan di balik upaya diplomasi ini. Kajian ini dikerjakan dengan metode sejarah dengan menggunakan arsip, majalah, dan surat kabar sebagai sumber. Kajian ini bertujuan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, tantangan yang dihadapi, hingga kondisi sosial dan politik yang mewarnai proses diplomasi selama bertahun-tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menggagas hingga mempersiapkan KAA Kedua dilakukan oleh Indonesia setidaknya selama hampir satu dekade (1955-1965). Rencana penyelenggaraan konferensi ini bahkan berkali-kali mengalami perubahan tempat pelaksanaan mulai dari Mesir hingga Aljazair. Meskipun telah menempuh proses diplomasi selama hampir satu dekade, konferensi ini batal dilaksanakan akibat situasi politik regional dan internasional yang kurang mendukung. Dengan demikian, kebaruan dari kajian ini terletak pada pola dan langkah diplomatik yang diambil Indonesia menuju terselenggaranya KAA kedua, seperti upaya diplomasi pribadi, safari politik, dan pertemuan diplomatik.

Kata kunci: diplomasi Indonesia, Konferensi Asia Afrika (KAA) Kedua, solidaritas Asia Afrika, Aljazair, dan Mesir.

A. PENDAHULUAN

Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955 menjadi salah satu pencapaian penting politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Konferensi ini melekat dalam memori kolektif bangsa Indonesia hingga abad ke-21. Harus diakui bahwa KAA merupakan momentum yang mampu menggoncang politik internasional pada masanya, terlebih konferensi ini diselenggarakan ketika polarisasi akibat Perang Dingin masih terus terjadi. Kesuksesan KAA berhasil memberikan tempat terhormat bagi negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini membuat negara-negara di Asia dan Afrika yang sebagian merupakan negara pascakolonial hadir di tengah-tengah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang masih terlibat Perang Dingin (Dinkel 2018:82). Sementara itu, Indonesia sebagai tuan rumah KAA juga mendapat tempat yang terhormat

di kancah politik internasional. Prestasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif (Leifer 1989:58). Pasca KAA, Indonesia terlibat diplomasi aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Asia dan Afrika seperti diplomasi penyelesaian konflik akibat nasionalisasi Terusan Suez di Mesir dan dalam usaha-usaha kemerdekaan di Aljazair.

Kesuksesan penyelenggaraan KAA 1955 membuat Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno ingin mengulang keberhasilan tersebut melalui KAA Kedua. Konferensi kedua sebenarnya hampir saja berhasil diselenggarakan, namun menjelang pelaksanaannya pada 1965 justru terjadi peristiwa kudeta di Aljazair yang turut berkontribusi terhadap kegagalan pelaksanaan konferensi. Lebih dari itu, Millar dan Miller (1965) bahkan melihat bahwa kegagalan KAA Kedua

menjadi cerminan kehancuran dan perpecahan solidaritas Asia Afrika.

Meskipun KAA Kedua gagal dilaksanakan, upaya Indonesia dalam rencana penyelenggaraan konferensi ini tidak dapat dilupakan begitu saja. Sejarah mencatat bahwa setidaknya selama hampir sepuluh tahun Indonesia telah melakukan berbagai prakarsa diplomatik agar konferensi ini tetap terlaksana.

Pembahasan mengenai KAA Kedua sebenarnya sudah disinggung oleh beberapa akademisi. Franklin B. Weinstein (1965) dalam kajiannya yang sangat komprehensif yakni *The Second Asian-African Conference: Preliminary Bouts* telah memberikan pemaparan mengenai KAA Kedua. Kajian ini bahkan berfungsi sebagai salah satu tinjauan paling awal mengenai sejarah KAA Kedua. Sayangnya Weinstein (1965) tidak melihat lebih detail mengenai langkah diplomatik Indonesia menuju KAA Kedua. Topik ini sebenarnya disinggung dalam kajian-kajian mengenai politik luar negeri Indonesia. Michael Leifer (1989) dalam kajiannya *Politik Luar Negeri Indonesia* menempatkan KAA Kedua sebagai media untuk mencari dukungan diplomatik dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Sementara itu, Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia (1996) dalam *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*. Jilid II membahas KAA Kedua dalam konteks hubungannya dengan Gerakan Nonblok. Wildan Sena Utama (2017) dalam kajiannya yang berjudul *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi*

Gerakan Global Antiimperialisme turut menyinggung pelaksanaan KAA Kedua sebagai bagian dari kemunduran era Bandung. Kajian terbaru adalah skripsi dari Ayu Wulandari (2021) dalam *Di Balik Meja Perundingan: Tiga Diplomat Perempuan dalam Misi Diplomasi Indonesia (1946-1960an)*. Tulisan ini yang hanya menyinggung peran diplomat perempuan Indonesia dalam KAA Kedua, sementara itu peran diplomat laki-laki tidak dikaji secara mendalam. Jika diperhatikan lebih lanjut, kajian-kajian yang pernah dilakukan tidak secara detail membahas siapa saja tokoh yang terlibat dalam proses diplomasi, dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut menjalankan diplomasinya.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kajian detail mengenai upaya diplomatik Indonesia menuju penyelenggaraan KAA Kedua masih sangat terbatas. Karenanya, kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan historiografi tersebut. Secara khusus, kajian ini fokus pada tiga aspek penting yaitu lahirnya gagasan penyelenggaraan KAA Kedua, upaya diplomatik melalui beberapa tokoh, hingga peristiwa yang terjadi sepanjang 1955-1965 yang memengaruhi proses diplomasi tersebut. Dengan demikian, unsur kebaruan dalam kajian ini adalah penekanan pada pola dan langkah diplomatik yang diambil seperti upaya diplomasi pribadi, safari politik, dan upaya lainnya seperti pertemuan diplomatik yang sering kali absen dalam pembahasan sejarah panjang KAA Kedua.

Terminologi “diplomasi” menjadi kata kunci dalam kajian ini. Secara umum, diplomasi dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, baik negara-negara yang berdaulat ataupun negara yang masih asing bagi negara pengirim (Berridge dan James 2003:76). Namun dalam kajian ini, “diplomasi” yang dimaksud lebih tepat merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Roy (1995) di mana “diplomasi” dilihat sebagai sebuah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki kepentingannya sendiri selama mendorong terselenggaranya KAA Kedua, yakni kepentingan untuk merebut Irian Barat dan melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Roy (1995:94) juga memberikan konsep yang mendasar bahwa diplomasi tidak terlepas dari peran perwakilan negara. Oleh karena itu, kajian ini juga menempatkan para perwakilan negara (dalam hal ini adalah para diplomat) sebagai aktor penting dalam upaya mendorong penyelenggaraan KAA Kedua.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk membahas diplomasi Indonesia dalam upaya penyelenggaraan KAA Kedua. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam kajian ini adalah (1) mengapa Indonesia berupaya menyelenggarakan KAA Kedua? (2) Bagaimana proses dan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia? (3) Bagaimana hasil dari proses diplomasi tersebut? Secara khusus, kajian ini diharapkan dapat menunjukkan interkoneksi antara

Indonesia dengan aktivitas politik regional dan internasional dalam rentang waktu 1950an hingga 1960an.

B. METODE

Kajian ini dikerjakan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan tahap penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo 2013:69). Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer berupa arsip, majalah, dan surat kabar sezaman. Arsip yang digunakan merupakan koleksi milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, sementara itu majalah dan surat kabar sebagian merupakan koleksi milik Perpustakaan Nasional RI. Heuristik juga dilakukan secara daring terutama untuk mengakses sumber-sumber dari berbagai negara.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan dengan menganalisa isi sumber-sumber yang telah didapatkan. Verifikasi yang dilakukan terutama berupa koraborasi data, termasuk ketika terdapat keraguan mengenai kapan gagasan penyelenggaraan KAA Kedua muncul. Karenanya, beberapa sumber sekaligus dibandingkan dan diperoleh fakta bahwa gagasan tersebut telah ada setidaknya empat bulan sejak KAA pertama selesai diselenggarakan. Setelah melakukan verifikasi, sumber-sumber yang telah teruji kemudian diinterpretasi sehingga menghasilkan fakta sejarah. Fakta inilah yang kemudian disusun untuk menjadi sebuah historiografi yang utuh dan kronologis.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Gagasan Penyelenggaraan KAA Kedua

Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada 1955 di Bandung tidak dapat dipungkiri telah mengangkat nama Indonesia dan negara-negara Asia Afrika ke kancah internasional. Selain memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*), KAA juga dinilai memiliki arti tersendiri bagi Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara. Sebagaimana dituliskan oleh Legge (2003), keberadaan KAA menjadi sangat penting bagi Presiden Soekarno terutama karena konferensi ini dapat menjadi media untuk memunculkan dirinya sebagai pemimpin besar yang menyatukan negara-negara Dunia Ketiga. Karenanya, tidak heran jika Presiden menghendaki penyelenggaraan KAA Kedua. Meskipun menurut Weinstein (Juli 1965:359), KAA 1955 tidak didesain untuk dilanjutkan dalam KAA Kedua atau seterusnya. Namun pada faktanya, Indonesia pernah menjadi bagian dari negara-negara yang mengupayakan penyelenggaraan KAA Kedua.

Ide untuk menyelenggarakan KAA Kedua dicetuskan oleh Soekarno setidaknya empat bulan setelah KAA Bandung selesai diselenggarakan (Utama 2017:193). Alasan utama dari penyelenggaraan konferensi ini adalah meningkatkan perdamaian di kawasan Asia dan Afrika. Namun di kemudian hari, alasan pentingnya KAA Kedua diselenggarakan terus mengalami perubahan. Ida Anak Agung Gde Agung (1973:534) misalnya menulis bahwa pada 1960an Pemerintah Indonesia

menggunakan rencana KAA Kedua untuk memperoleh dukungan dalam mengatasi konflik dengan Federasi Malaysia.

Gagasan penyelenggaraan KAA Kedua menjadi lebih serius pada 1956. Hal ini tampak dari keputusan Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk mengomunikasikan pentingnya pelaksanaan KAA Kedua dalam rangka menjaga perdamaian. Karenanya, Ali Sastroamidjojo menyampaikan gagasan tersebut kepada parlemen pada awal 1956 (Anonim 1956c:1). Setelah dibahas melalui parlemen, gagasan penyelenggaraan KAA Kedua makin naik ke permukaan. Beberapa negara seperti Mesir dan Cina juga turut mendukung dan menyuarakan gagasan ini. Oleh karena itu, ketiga negara tersebut yakni Indonesia, Cina, dan Mesir segera menjajaki kemungkinan diselenggarakannya KAA Kedua dengan negara-negara inisiator KAA 1955. Perlu digarisbawahi bahwa gagasan KAA Kedua tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan solidaritas Asia Afrika atau menjaga keamanan dan perdamaian saja, sebab Indonesia juga memiliki kepentingan di balik rencana ini. Sebagaimana menurut McGregor dan Hearman (2017:173), bahwa sejak pencetus Demokrasi Terpimpin pada 1959, Indonesia memiliki ambisi yang besar untuk memenangkan diplomasi atas Irian Barat hingga melawan pembentukan Federasi Malaysia, sehingga Presiden Soekarno memerlukan ruang agar Indonesia bisa menghimpun kekuatan dan dukungan yang salah satunya adalah dari kalangan Asia dan Afrika.

Pada awalnya, KAA Kedua direncanakan untuk digelar di Kairo pada 1956. Pemilihan Kairo sebagai tempat pelaksanaan konferensi ini diusulkan oleh Chou En Lai yang kemudian disetujui oleh Pemerintah Mesir (Anonim 1956b:1). Pemerintah Mesir juga menambahkan agar konferensi digelar setelah bulan Ramadhan 1956, dengan perkiraan waktu pada Juni 1956 atau November 1956 (Anonim 1955:11). Sayangnya, rencana ini harus ditunda akibat konflik nasionalisasi Terusan Suez yang terjadi di Mesir pada pertengahan 1956.

Sebagaimana telah diketahui, pada 29 Juli 1956 Nasser secara resmi mengumumkan nasionalisasi terhadap Terusan Suez dan perusahaannya yakni *Suez National Company* (McDermott 1998:135). Nasionalisasi ini membuat beberapa pihak seperti Inggris, Prancis, dan Israel meradang sehingga menyebabkan konflik kawasan. Inggris sebagai negara yang sebelumnya mengelola pelayaran dan perdagangan di Terusan Suez merasa kepentingan ekonominya terganggu. Adapun Prancis merasa kepentingan politiknya terganggu oleh Mesir. Jika Mesir menjadi negara yang berdaya dari sisi ekonomi dan politik, maka Prancis khawatir Mesir akan semakin gencar mendukung kemerdekaan Aljazair. Apalagi selama ini, Mesir menjadi salah satu negara pemasok senjata untuk *Front de Liberation Nationale* (FLN), sebuah gerakan revolusi kemerdekaan di Aljazair (Bilqis 2019:30). Sementara itu, Israel turut meradang karena nasionalisasi Terusan Suez dinilai mengancam kepentingannya untuk menguasai Palestina dan sekitarnya

(Azar 1972:197). Dengan memuncaknya konflik ini, maka penyelenggaraan KAA Kedua di Mesir dianggap tidak perlu lagi karena keamanan peserta konferensi jelas berada dalam ancaman.

Namun, konflik Terusan Suez rupanya tidak menggentarkan semangat Indonesia untuk mengulang kesuksesan Konferensi Bandung. Ketika konflik Suez masih berlangsung, Pemerintah Indonesia bahkan mengusulkan agar KAA Kedua segera diselenggarakan dengan alasan bahwa KAA Kedua dapat memperkuat dukungan regional terhadap Mesir. Hal ini tercatat dalam *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid II, di mana Presiden Soekarno menyatakan,

“...Jangan sentuh Mesir, jangan ganggu-gugat Mesir! Kalau tergantung dari saya, maka dengan segera saya niscaya panggil Konferensi Asia-Afrika yang kedua untuk membicarakan *call* ini!” (Soekarno 1965:172).

Sayangnya, beberapa negara tidak menyetujui usulan Pemerintah Indonesia. Joseph Broz Tito dari Yugoslavia bahkan menyarankan agar Indonesia memperjuangkan masalah nasionalisasi Terusan Suez melalui PBB saja (Schaefer et al. 2013:294). Akibatnya, penyelenggaraan KAA Kedua masih tertunda. Mesir juga memilih menyetujui penundaan ini mengingat kepentingan nasionalnya sedang terancam oleh koalisi Inggris, Prancis, dan Israel. Penundaan konferensi juga dilatarbelakangi oleh permintaan langsung dari negara-negara peserta konferensi dengan alasan jika konferensi tetap dilangsungkan, maka hanya akan menghasilkan resolusi yang sama dengan

KAA pertama yang dilaksanakan di Bandung sebelumnya (Anonim 1956d:2). Dengan alasan tersebut, beberapa negara termasuk India dan Mesir sama-sama menyetujui penundaan KAA Kedua hingga 1957 (Anonim 1956a).

Indonesia kembali membicarakan rencana penyelenggaraan KAA Kedua pada 1957 ketika kondisi di Mesir berangsur membaik.¹ Untuk meyakinkan pentingnya konferensi ini, Ali Sastroamidjojo dalam pertemuan dengan wakil lima negara pemrakarsa KAA menyatakan bahwa KAA Kedua memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan menjaga perdamaian dunia. Sayangnya, harapan untuk menyelenggarakan konferensi kembali pupus karena beberapa negara, termasuk India, belum menemukan urgensi KAA Kedua. Akibatnya, hingga 1960, rencana KAA Kedua sama sekali tidak terlaksana dan hanya berupa "...seruan sporadis, terutama dari Indonesia yang terdengar menuntut diadakannya KAA Kedua" (Utama 2017:194).

2. Langkah Diplomatik Indonesia Menuju KAA Kedua

Upaya diplomatik kembali dicoba pada 1961 setelah Konferensi Nonblok sukses dilaksanakan di Beograd. Namun sama seperti sebelumnya, upaya Indonesia ini masih belum mendapat respons yang positif dari negara-negara Asia Afrika. Melihat hal ini, maka pada awal 1961 Menteri Luar Negeri (Menlu) Soebandrio

menekankan pentingnya KAA Kedua dengan memberikan pernyataan bahwa konferensi ini memiliki esensi yang berbeda dengan KAA pertama. Melalui harian *Suluh Indonesia* dapat diketahui bahwa menurut Soebandrio, KAA 1955 yang olehnya disebut sebagai "KAA pertama" adalah upaya negara-negara Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan, sementara KAA Kedua akan berfokus kepada upaya penyelesaian konflik yang ada di Asia, Afrika, dan dunia internasional (Anonim 1961d).

Realisasi dari misi penyelenggaraan KAA Kedua terlihat pada sejumlah langkah melalui upaya diplomatik. Indonesia sebenarnya tidak sendirian melainkan dibantu oleh Cina. Terutama sejak perjanjian persahabatan kedua negara ditandatangani pada April 1961, kedua negara ini berkali-kali menyuarakan tentang KAA Kedua (Pauker 1965:425).

Langkah diplomatik yang cukup terlihat dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara. Presiden Soekarno melakukan perjalanan keliling dunia dengan mengunjungi negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa. Perjalanan tersebut sebenarnya dilakukan dalam rangka mempererat hubungan diplomatik dan membahas KTT Nonblok, namun dalam kunjungannya ke negara-negara Asia dan Afrika, Presiden Soekarno juga menyelipkan misi untuk melancarkan rencana penyelenggaraan KAA Kedua. Singkatnya, perjalanan tersebut dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno untuk melakukan "diplomasi pribadi"

¹ Indikator dari selesainya konflik ini adalah adanya penarikan tentara Inggris, Prancis, dan Israel dari kawasan Mesir.

dan konsultasi mengenai KAA Kedua (Anonim 1961d).

Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara juga mengutus beberapa diplomat untuk melakukan diplomasi lanjutan. Setidaknya terdapat tiga diplomat yang menjadi aktor utama dalam misi ini, yakni Soebandrio yang saat itu berstatus sebagai Menteri Luar Negeri, Supeni Pudjobuntoro yang berstatus sebagai duta besar keliling yang kemudian diangkat sebagai Wakil III Menteri Luar Negeri, serta Ali Sastroamidjojo yang memiliki pengaruh kuat di Asia dan Afrika². Dua tokoh yang terakhir disebutkan adalah orang-orang yang sebelumnya sangat berpengaruh dalam KAA 1955 di Bandung. Supeni Pudjobuntoro menjadi salah satu perempuan yang menjadi anggota delegasi dan berhasil memengaruhi peserta KAA untuk mendukung misi pembebasan Irian Barat (Wulandari 2021). Sementara kiprah Ali Sastroamidjojo dalam KAA tidak perlu diragukan lagi mengingat ia merupakan inisiator konferensi tersebut.

Pemerintah Indonesia mengutus Supeni pada 1961 untuk datang ke sejumlah negara Asia dan bertemu dengan para pemimpin negaranya guna membicarakan kemungkinan penyelenggaraan KAA Kedua (Anonim 1961c:7). Beberapa negara yang dikunjungi adalah Burma (Myanmar),

Kamboja, Srilanka, Sudan, hingga United Arab Republic (UAR) yang terdiri atas Mesir dan Suriah (Anonim 1961b:172). Sayangnya, tidak semua negara yang dikunjungi memberikan respons yang positif mengenai penyelenggaraan KAA Kedua. Dalam kunjungannya ke India misalnya, Supeni mendapatkan respons yang dingin dari Nehru (Anonim 1961a). Nehru tidak menolak KAA Kedua secara terang-terangan, namun dia juga tidak memberikan persetujuannya terhadap rencana tersebut. Sikap Nehru tersebut dilatarbelakangi oleh konflik perbatasan antara India dengan Cina. Akibat konflik ini, Cina bahkan beberapa kali melancarkan serangan ke India. Karenanya, menurut Nehru sangat tidak berguna jika konferensi diselenggarakan sementara negara-negara di Asia sendiri masih terlibat konflik (Anonim 1961c:7). Jawaban yang kurang suportif juga didapatkan Supeni ketika mengunjungi Jepang. Menurut Pemerintah Jepang, belum saatnya negara-negara Asia Afrika mengadakan konferensi (Anonim 1961c:7).

Upaya Indonesia yang terus menerus secara bertahap mulai mendapatkan dukungan. Filipina menyampaikan dukungan melalui Emmanuel Palaez yang menyatakan bahwa negaranya akan mengirimkan delegasi dalam KAA Kedua (Anonim 1962e:1). Meskipun pada awalnya, Filipina hanya berkenan menjadi negara peserta konferensi dan menolak untuk terlibat dalam proses persiapannya. Dukungan juga datang dari Irak yang menilai bahwa tujuan KAA Kedua

² Penunjukan Ali Sastroamidjojo sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab Ali Sastroamidjojo merupakan salah satu sosok yang paling berpengaruh di mata pemimpin negara-negara Asia Afrika.

sejalan dengan gerakan revolusioner mereka (Anonim 1962c:1).

Pemerintah Indonesia juga mengadakan dialog dengan pemimpin negara lain yang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jakarta. Presiden Soekarno membahas pentingnya KAA Kedua dengan Norodom Sihanouk di Jakarta saat kunjungannya pada Desember 1962. Sihanouk rupanya menerima rencana KAA Kedua dengan tangan terbuka. Pertemuan tersebut juga menghasilkan pernyataan bersama antara Soekarno dan Sihanouk bahwa kedua negara sepakat mengadakan KAA Kedua untuk memperbaiki hubungan persahabatan dan menciptakan perdamaian yang menguntungkan di antara negara-negara Asia dan Afrika (Anonim 1962d:1).

Sayangnya, tidak ditemukan data mengenai jumlah pasti negara yang mendukung KAA Kedua ini hingga akhir 1962. Namun demikian, keputusan penyelenggaraan konferensi juga masih menunggu respons dari Pemerintah India. Dukungan India menjadi sangat penting karena menurut prosedur yang berlaku, KAA Kedua hanya dapat dilaksanakan jika seluruh negara-negara Kolombo³ memberikan persetujuan mereka (Anonim 1958:1). Untuk mendapatkan dukungan dari India maka Pemerintah Indonesia melibatkan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi yang saat itu dipimpin oleh Moekarto

Notowidigdo, khususnya untuk berbicara secara langsung dengan Pemerintah India (Anonim 1962b:1). Namun, upaya diplomatik tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Pemerintah India rupanya masih ragu untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan KAA Kedua, mengingat makin meruncingnya konflik dengan Cina. Konflik kedua negara ini memang menjadi salah satu permasalahan mendasar yang selama ini menghalangi pelaksanaan KAA Kedua. Untuk mencari jalan keluar, maka konflik tersebut dibahas dalam Konferensi Enam Negara Asia Afrika Non Blok (*Conference of Six Afro-Asian Non-Aligned Countries*) yang diadakan di Kolombo, Srilanka pada 10-12 Desember 1962. Konferensi tersebut diikuti oleh enam negara Nonblok yakni Indonesia, United Arab Republic (UAR), Ghana, Burma, Kamboja, dan Srilanka. Keenam negara sepakat untuk membuka jalan agar India dan Cina dapat menyelesaikan konfliknya dengan jalan damai (Anonim 1962a:1).

Kesepakatan dalam *Conference of Six Afro-Asian Non-Aligned Countries* rupanya menjadi angin segar bagi Pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Soebandrio secara khusus menegaskan bahwa kesepakatan tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi terselenggaranya KAA Kedua (Anonim 1962a:1). Meskipun pada kenyataannya, KAA Kedua tidak pernah terlaksana hingga akhir 1963 karena India masih tetap menolak untuk bekerjasama dengan Cina. Pemerintah India dengan dukungan kuat dari Tito (Yugoslavia) bahkan memilih untuk

³ Yang dimaksud negara-negara Kolombo (*Colombo Powers*) adalah negara yang terlibat dalam Konferensi Panca Negara I atau Konferensi Kolombo yakni Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Srilanka.

fokus dengan Konferensi Non Blok yang akan digelar kembali di Kairo pada Oktober 1964. Persaingan sengit antara India dengan Cina pada akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong persaingan antara gagasan “Bandung” dan “Beograd” yang cukup berpengaruh dalam upaya menyelenggarakan KAA Kedua.⁴ Indonesia dapat dipastikan masuk ke dalam blok “Bandung”, di mana kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan istilah NEFO (*New Emerging Forces*) yang didominasi negara-negara Afrika.⁵

Pemerintah Indonesia tetap mendekati Pemerintah India agar dapat diajak bekerja sama. Di sisi lain, Indonesia bersama Cina terus menindaklanjuti rencana KAA Kedua. Pada April 1964, misalnya, diadakan

sebuah pertemuan tingkat menteri di Jakarta untuk membahas kelanjutan rencana KAA Kedua. Indonesia mengirimkan rombongan delegasi di bawah pimpinan Soebandrio (ANRI 1964). Hasil pertemuan menyepakati bahwa KAA Kedua akan digelar pada Maret 1965 dan harus bertempat di salah satu negara Afrika. Aljazair akhirnya menjadi negara yang terpilih sebagai tuan rumah. Terpilihnya Aljazair sebagai tuan rumah ini menimbulkan sebuah pertanyaan, “mengapa bukan Indonesia yang menjadi tuan rumahnya?” Hingga saat ini, belum ditemukan jawaban yang pasti atas pertanyaan ini. Namun menurut Zhou (2019:291), Indonesia tidak sanggup menanggung beban sebagai penyelenggara konferensi karena tengah disibukkan dengan masalah Konfrontasi Malaysia. Zhou (2019) juga berargumen bahwa perekonomian Indonesia pada saat itu sedang kacau, sehingga Pemerintah Indonesia memilih untuk melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Ben Bella (Presiden Aljazair). Namun, ada pula anggapan bahwa Indonesia memilih Aljazair sebagai tuan rumah konferensi karena mempertimbangkan semangat rakyat Aljazair dalam meraih kemerdekaan. Salah satu anggota delegasi, Supeni Pudjobuntoro, mengatakan bahwa Aljazair dipilih sebagai lokasi konferensi untuk menghormati perjuangan rakyatnya yang berhasil melawan Prancis (Tista 1989).

Pertemuan di Jakarta tersebut menghasilkan sebuah komite persiapan (*preparatory committee*) sebagai panitia persiapan KAA Kedua. Komite

⁴ “Bandung” dan “Beograd” adalah istilah yang umum digunakan untuk merujuk kepada kelompok negara yang terlibat dalam “kompetisi” pelaksanaan konferensi. Kelompok “Bandung” merujuk kepada negara-negara seperti Indonesia dan Cina yang memilih untuk mendukung penyelenggaraan KAA Kedua. Sementara itu, kelompok “Beograd” merujuk kepada negara-negara yang ingin menyelenggarakan Konferensi Nonblok seperti India dan Yugoslavia. Kompetisi ini setidaknya menjadi sinyal ketidakstabilan dan adanya perselisihan internal di antara negara-negara Asia dan Afrika.

⁵ NEFO atau *New Emerging Forces* mengacu pada istilah yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno yang dimaknai sebagai kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit dan menggugat kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan (OLDEFOS atau *Old Established Forces*). Blok NEFO dalam pandangan Presiden Soekarno meliputi negara-negara atau bangsa di Asia, Afrika, negara-negara sosialis, dan kekuatan progresif yang tumbuh di negara kapitalis.

ini terdiri atas lima belas negara yakni Indonesia, Aljazair, Kamboja, Ethiopia, Ghana, Republik Guinea, India, Malawi, Maroko, Pakistan, Cina, Iran, Tanzania, Zambia, dan UAR (Mesir dan Suriah).

Pertemuan ini juga membahas tentang perdebatan mengenai kehadiran Uni Soviet sebagai tamu undangan dalam KAA Kedua. Delegasi Cina menolak kehadiran Uni Soviet dengan alasan Uni Soviet bukan bagian dari wilayah Asia Afrika.⁶ Pemerintah Indonesia kemudian mengusulkan untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah sub-komite khusus yang terdiri atas Indonesia, Pakistan, dan Filipina. Sayangnya, tidak ada keputusan final yang dihasilkan. Hanya saja dalam perjalanannya, Cina akhirnya menyetujui kehadiran Uni Soviet dalam rencana penyelenggaraan KAA Kedua.

Setelah pertemuan di Jakarta, Pemerintah Indonesia melanjutkan misi diplomatiknya ke beberapa negara. Pemerintah mengutus Supeni untuk mengunjungi Mali dan bertemu dengan Presiden Modibo Keita pada Oktober 1964. Dalam kunjungannya, Supeni meminta Keita untuk mengirimkan delegasi dalam KAA Kedua. Keita

pun memberikan persetujuannya. Kemudian pada Januari 1965, Supeni mengunjungi Zambia dan mengajak pemerintahnya untuk ikut serta dalam KAA Kedua di Aljazair (Anonim 1965p:2). Sementara itu, Soebandrio yang pada akhir 1964 mendapatkan tugas untuk hadir dalam Sidang Umum PBB juga menyempatkan bertemu dengan pemimpin negara-negara Asia dan Afrika yang hadir untuk membicarakan persiapan KAA Kedua (Anonim 1964c:1).

Misi diplomatik terus dilakukan seiring dengan makin besarnya dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi. Pada 1965, Ali Sastroamidjojo mendapatkan misi untuk mengunjungi wilayah pantai timur dan barat Afrika (Wulandari 2021:157). Sementara Ali bergerak ke wilayah timur dan barat, Supeni Pudjobuntoro mengunjungi beberapa negara Afrika bagian tengah dan barat. Supeni bertemu langsung dengan Presiden Kongo, Alphonso Masamba Debat. Selain Kongo, Supeni juga mengunjungi Kamerun. Wilayah Afrika memang menjadi destinasi utama bagi para diplomat utusan pemerintah sejak terjadi persaingan antara Bandung dan Beograd. Karenanya, Indonesia sebagai pemimpin NEFO memilih untuk memperluas pengaruhnya ke kawasan Afrika (Utama 2017:200).

Upaya diplomatik Indonesia yang gencar dilakukan tidak lepas dari konflik-konflik yang melibatkan Indonesia. Indonesia berseteru dengan Malaysia pada 1960an. Konflik yang kemudian dikenal sebagai “Konfrontasi Malaysia” ini dilatarbelakangi oleh penentangan Indonesia terhadap

⁶ Penolakan tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pecahnya konflik antara Cina dan Uni Soviet akibat sikap Uni Soviet yang memilih berkoeksistensi dengan Amerika Serikat karena ancaman terjadinya perang nuklir. Meskipun memiliki ideologi yang sepeham, Cina memilih menolak keputusan Uni Soviet sehingga muncul “perang dingin” antara kedua negara ini. Lihat: Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 101-102.

pembentukan Federasi Malaysia yang menurut Presiden Soekarno dapat menjadi manifestasi neokolonialisme di Asia Tenggara. Penolakan ini berpengaruh terhadap upaya diplomasi menuju KAA Kedua.

Kunjungan diplomatik dalam mencari dukungan penyelenggaraan KAA Kedua, sekaligus merupakan misi untuk menggalang dukungan dalam konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Bahkan dalam misi diplomasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang diutus pemerintah, diselipkan permintaan agar negara-negara yang bersedia hadir dalam KAA Kedua menolak keterlibatan Malaysia. Walaupun demikian, Pemerintah Indonesia berkali-kali telah menegaskan bahwa keputusan keikutsertaan Malaysia dalam KAA Kedua tidak sepenuhnya berada di tangan Indonesia, seperti yang dikatakan Soebandrio bahwa “ikut-sertanja ‘Malaysia’ dalam konperensi AA-II bukan ditentukan oleh satu atau dua negara, tetapi oleh sidang kepala2 negara” (Anonim 1964a:1). Namun dalam langkah diplomatik yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah, terlihat jelas Indonesia menolak kehadiran Malaysia. Dalam kunjungan diplomatiknya ke Jepang pada 1965, Soebandrio sempat meminta agar Pemerintah Jepang mempertimbangkan kembali mengenai dukungannya terhadap kehadiran Malaysia dalam KAA Kedua. Pemerintah Jepang sempat menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengadakan konferensi atau pertemuan puncak dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalahnya secara damai. Namun menurut Soebandrio,

sangat tidak mungkin mengadakan konferensi atau pertemuan antara Indonesia dengan Malaysia sebelum KAA Kedua berlangsung dengan dalih sisa waktu yang ada sangat terbatas (Anonim 1965a.f, 1). Argumen Soebandrio bahwa waktu yang tersisa sangatlah terbatas memang ada benarnya, mengingat pembicaraan dengan Jepang dilakukan hanya satu bulan sebelum KAA Kedua berlangsung. Di sisi lain, jawaban Soebandrio menunjukkan keengganan Pemerintah Indonesia untuk berdamai dengan Malaysia.

Upaya menolak kehadiran Malaysia dalam KAA Kedua sebenarnya cukup berisiko untuk dilakukan karena negara-negara Asia Afrika sendiri terbagi menjadi dua golongan yaitu negara yang mendukung pembentukan Federasi Malaysia dan golongan negara yang menentangnya. Sementara itu, Indonesia tetap dalam posisi menolak federasi tersebut. Oleh karenanya, Nehru mengusulkan untuk mengadakan voting mengenai kehadiran Malaysia. Namun usulan tersebut ditolak oleh sejumlah negara seperti Liberia yang menganggap bahwa voting tidak perlu dilakukan karena Malaysia berhak mendapatkan tempat dalam KAA Kedua.

Penolakan Indonesia terhadap kehadiran Malaysia ditegaskan Presiden Soekarno dengan mengatakan bahwa negara-negara yang memilih menerima kehadiran Malaysia dalam KAA Kedua disilakan untuk keluar dari daftar anggota konferensi ini, sebab menurutnya KAA Kedua lebih baik diisi oleh negara-negara yang antiimperialis (Anonim 1965a.b:1).

Pandangan Presiden Soekarno tersebut menegaskan bahwa mendukung pembentukan Federasi Malaysia sama saja dengan mendukung tumbuh suburnya imperialisme. Soekarno kembali menyatakan dalam peringatan ulang tahunnya pada Juni 1965 bahwa ia telah memberikan pesan khusus kepada Presiden Aljazair, Ben Bella, agar KAA Kedua menjadi konferensi yang antiimperialisme (Anonim 1965q:2). Presiden Soekarno menambahkan, bahwa “Lebih baik djumlahnja ketjil tapi kompak anti imperialisme, dari pada djumlahnja besar jg tidak kompak anti imperialisme, jang bantu Malaysia... lebih baik keluar sadja dari K.A.A. II” (Anonim 1965q:2).

Sayangnya, ucapan Presiden Soekarno tidak menghasilkan solusi apapun kecuali hanya membuat permasalahan makin meruncing. Beberapa negara tetap meminta agar Pemerintah Indonesia menerima kehadiran Malaysia dalam KAA Kedua. India melalui perdana menternya, Lal Bahadur Shastri, menyatakan bahwa negaranya tetap mendukung keikutsertaan Malaysia (Anonim 1965n:1). Merespons fakta tersebut, pemerintah melalui Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa “kalau India berusaha memasukkan ‘Malaysia’ ke dalam Konperensi Afrika, Asia, maka India tidak setia lagi kepada sumber kemerdekaannja...” (Anonim 1965a.c:1). Sumber kemerdekaan yang dimaksud oleh Presiden Soekarno adalah ajaran Mahatma Gandhi yang menurutnya menjadi inspirasi kemerdekaan India. Presiden Soekarno menilai bahwa Gandhi adalah orang yang sangat anti terhadap Inggris,

karenanya jika Pemerintah India memilih untuk menyetujui kehadiran Malaysia, yang dibentuk oleh Inggris, maka hal ini telah dinilai bertentangan dengan gagasan kemerdekaan mereka.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan KAA Kedua tertunda karena pertimbangan waktu. Konferensi yang semula direncanakan untuk dilaksanakan pada 10 Maret 1965 kemudian kembali ditunda hingga Juni 1965 (Weinstein 1965:359). Penundaan tersebut dilakukan atas permintaan India dan Uni Soviet, dimana kemudian diambil kesepakatan bahwa konferensi tingkat menteri luar negeri akan dilaksanakan sebelum konferensi utama dibuka pada 29 Juni 1965.

Sejak pembatalan dilakukan, rencana pelaksanaan KAA Kedua menjadi makin tidak jelas. Hanya saja, Pemerintah Indonesia dan beberapa negara masih optimis untuk mengambil sejumlah langkah diplomatik. Pemerintah Indonesia bahkan masih melakukan diplomasi keliling ke beberapa negara. Pada Mei 1965, Supeni masih melakukan kunjungan ke beberapa negara Afrika untuk membicarakan persiapan KAA Kedua. Atas perintah dari Jakarta, Supeni melanjutkan misinya ke Mesir, Somalia, dan berakhir di Aljazair yang merupakan tuan rumah konferensi. Supeni tiba di Aljazair pada awal Juni 1965 untuk menunggu pembukaan konferensi persiapan KAA Kedua. Kedatangannya di Aljazair dilatarbelakangi dengan alasan bahwa ia merupakan salah satu delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut (Tista 1989:220). Sementara itu, Menteri Luar Negeri Soebandrio terus

melakukan upaya diplomasi dengan melakukan kunjungan diplomatik Ethiopia dan Mesir untuk membahas persiapan KAA Kedua pada pertengahan Juni 1965 (Anonim 1965m:1). Kunjungan ini dilakukan atas perintah Presiden Soekarno sebelum seluruh delegasi Indonesia tiba di Aljazair. Langkah diplomatik yang terus berjalan ini menunjukkan besarnya harapan Pemerintah Indonesia atas pelaksanaan konferensi. Apalagi pada pertengahan Juni 1965, Organisasi Indonesia untuk Setiakawan Asia Afrika (OISRAA) mengeluarkan dukungannya agar peserta KAA Kedua menolak kehadiran Malaysia (Anonim 1965l:1). Dukungan ini semakin mempertebal keyakinan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri pada 24 Juni 1965 dan konferensi utama pada 29 Juni 1965.

3. Kudeta Ben Bella dan Menuju Kegagalan KAA Kedua

Menjelang pelaksanaan konferensi persiapan - yang menjadi rangkaian dari KAA Kedua - terdengar isu bahwa beberapa negara berniat untuk membatalkan konferensi. Isu ini muncul secara kuat ketika Nasser dan beberapa negara Arab dituduh berencana membatalkan konferensi. Namun isu ini segera ditepis oleh Pemerintah Aljazair melalui duta besarnya yang bertugas di Indonesia, yang menyatakan bahwa tidak ada upaya pembatalan konferensi dari negara-negara Arab (Anonim 1964a:1). Pemerintah Aljazair juga menegaskan bahwa upaya persiapan KAA Kedua masih terus berjalan di negaranya

sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sekitar satu bulan menjelang konferensi persiapan dibuka, Duta Besar Indonesia untuk Aljazair yakni Asa Bafagih menyampaikan kepada pers bahwa ada upaya dari kalangan neokolim untuk menggagalkan penyelenggaraan KAA Kedua (Anonim 1965l:1). Namun Asa Bafagih menegaskan bahwa,

“...propaganda² kotor yang dilantarkan dengan hebat oleh kaum Neokolim utk menggagalkan KAA Kedua itu ternyata mendapat jawaban setimpal dari kalangan rakjat AA sendiri, yang dengan spontan menajatkan tekadnya untuk mensukseskan KAA Kedua dan berjuang untuk melenjapkan segala rintangan dan kesukaran...” (Anonim 1965l:1).

Berbagai persiapan terus dilakukan hingga pada awal Juni 1965. Pemerintah dan masyarakat Aljazair bergotong royong melakukan renovasi dan pembersihan kota dengan membersihkan jalan, bangunan-bangunan publik, serta melakukan perawatan intensif terhadap taman kota (Anonim 1965d:11). Kemudian berdasarkan laporan utusan Pemerintah Aljazair, Bouattouara, kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1965 telah terdapat 36 negara Asia Afrika yang siap berpartisipasi dalam KAA Kedua (Anonim 1965a.a:1). Jumlah peserta konferensi ternyata kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai lima puluh negara dan terakhir tercatat sejumlah enam puluh negara. Undangan konferensi juga dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menjelang pembukaan konferensi, negara peserta KAA Kedua telah mengumumkan susunan hingga jadwal keberangkatan delegasinya. Delegasi Indonesia berada di bawah pimpinan Menlu Soebandrio berangkat pada 14 Juni 1965 dengan singgah terlebih dahulu ke beberapa negara Afrika (seperti Mesir dan Ethiopia) sebelum akhirnya menuju ke Aljazair (Anonim 1965a:1). Sementara itu, Presiden Soekarno bersama beberapa wakil pemerintah memilih berangkat terpisah dari rombongan Soebandrio.

Surat kabar *Duta Masyarakat* melaporkan dengan detail mengenai pengumuman keberangkatan hingga susunan delegasi dari beberapa negara. Seperti India yang mengirimkan 25 orang dalam rombongan delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri. Rombongan tersebut terdiri dari Menteri Luar Negeri India yakni Swaran Singh sebagai wakil kepala delegasi, Duta Besar India untuk Aljazair, Lebanon, dan Maroko, serta beberapa wakil Pemerintah India. Mesir dan Pakistan juga sepakat untuk mengirimkan delegasinya dalam KAA Kedua. Presiden Pakistan Ayub Khan bahkan secara khusus mengadakan kunjungan ke Mesir pada 14-16 Juni 1965 untuk menguatkan kesepakatan antara dua negara tersebut dalam mendukung pelaksanaan KAA Kedua (Anonim 1965z:1). Adapun Yordania mengirimkan sembilan orang dalam rombongan delegasi yang dipimpin oleh Raja Hussein, didampingi oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan beberapa pejabat tinggi lainnya (Anonim 1965i:1). Pemerintah Cina memberikan pengumuman bahwa

negaranya akan mengirimkan rombongan delegasi di bawah pimpinan Chou En Lai yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Chen Yi dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Ketika berbagai negara tengah menyiapkan keberangkatan delegasinya, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa kudeta yang terjadi di Aljazair. Pada 19 Juni 1965, setidaknya tepat sepuluh hari sebelum konferensi dibuka, dilaporkan telah terjadi peristiwa kudeta Presiden Ben Bella oleh Kolonel Houari Boumedienne (Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri 1971:273). Boumedienne merupakan kepala staf angkatan perang yang merangkap sebagai perdana menteri. Ia kemudian membentuk Dewan Revolusi yang bertugas meneruskan pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintahan Ben Bella. Peristiwa kudeta ini bukan hanya membuat kondisi Aljazair menjadi tidak stabil, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan KAA Kedua yang sebenarnya hanya tinggal menghitung hari. Meskipun sebenarnya, pemerintahan Boumedienne berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Aljazair sebagai tuan rumah konferensi.

Merespons peristiwa yang terjadi di Aljazair, Presiden Soekarno yang masih berada di Jakarta segera mengadakan sidang istimewa kabinet. Pemerintah kemudian mengumumkan bahwa Republik Indonesia mengakui pemerintahan Boumedienne sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Aljazair dan berharap bahwa KAA Kedua tetap dilaksanakan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui

Roeslan Abdulgani sebagai wakil pemerintah dengan memberikan pernyataan:

“Berhubung dengan kedjadian terachir di Aldjazair, dan setelah mempeladjar statement Pemerintah Aldjazair jang baru jang antara lain berisikan tekad untuk terus melangsungkan Konperensi Afrika Asia ke-II sesuai dengan tekad djiwa Semangat Bandung pada waktu jang telah ditetapkan belakangan ini menjatakan keketapan htinja untuk ikut serta mensukseskan KAA II di Aldjazair. Dalam pada itu, pemerintah RI berpendapat bahwa keberlangsungan KAA II tidak tergantung pada pengakuan oleh negara2 Afrika Asia terhadap pemerintah Aldjazair jang baru, karena perobahan pemerintahan adalah soal dalam negeri” (Anonim 21 Juni 1965:1).

Memperhatikan pengumuman tersebut, rombongan delegasi yang sebelumnya telah berangkat di bawah pimpinan Soebandrio mengadakan perundingan kecil di Paris⁷. Soebandrio bersama dengan rombongan delegasi akhirnya sepakat untuk tetap berangkat menuju Aljazair. Soebandrio juga mengadakan pembicaraan dengan Palaez (Filipina) mengenai situasi terkini di Aljazair, di mana keduanya menyimpulkan bahwa usaha-usaha untuk menyelenggarakan KAA Kedua harus tetap dilakukan dengan meng-

adakan peninjauan langsung ke Aljazair. Karenanya, delegasi dari Indonesia dan Filipina bertolak dari Paris menuju Aljazair. Selain Indonesia dan Filipina, delegasi yang juga berangkat ke Aljazair melalui Paris adalah delegasi dari Muangthai (Thailand), Laos, hingga Ethiopia (Anonim 1965j:2).

Konferensi tingkat menteri luar negeri yang seharusnya dibuka pada 24 Juni 1965 akhirnya ditunda satu hari akibat keterlambatan delegasi dari beberapa negara dan pembatalan keberangkatan beberapa delegasi. Konferensi yang menjadi rangkaian pembuka dari KAA Kedua ini akhirnya direncanakan untuk digelar pada 25 Juni 1965 dengan dihadiri 38 negara termasuk Indonesia, Cina, Srilanka, Afghanistan, Arab Saudi, Kuwait, Lebanon, Mali, Republik Rakyat Demokratik Korea, Maroko, Mongolia, Pakistan, India, Ethiopia, Turki, hingga Jepang (Anonim 1965s:1). Delegasi Indonesia yang telah tiba di Aljazair adalah rombongan pimpinan Soebandrio, sementara Presiden Soekarno belum tiba. Presiden Soekarno baru bertolak dari Jakarta pada 26 Juni 1965 dengan singgah terlebih dahulu di Karachi dan Kairo (Anonim 1965c:1). Di dalam pesawat yang berbeda, terdapat pula rombongan wakil-wakil pemerintah seperti Chaerul Saleh, Roeslan Abdulgani, D.N. Aidit, K.H. Saifuddin Zuhri, serta beberapa tokoh penting lainnya.

Menjelang pembukaan konferensi tingkat menteri luar negeri terjadi insiden pengeboman di lokasi sidang. Dalam insiden tersebut setidaknya terdapat sepuluh orang luka-luka, di

⁷ Setelah melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara Afrika, rombongan yang dipimpin Soebandrio singgah ke Paris. Delegasi dari berbagai negara juga singgah ke Paris terlebih dahulu sebelum masuk ke Aljazair.

mana dua diantaranya adalah anggota delegasi Cina dan delapan yang lainnya dari UAR (Mesir dan Suriah) (Anonim 1965v:1). Usai insiden pengeboman, Pemerintah Indonesia sebenarnya masih menunjukkan optimismenya untuk melanjutkan pelaksanaan KAA Kedua. Namun hingga 28 Juni 1965 masih banyak negara yang belum mengkonfirmasi kehadirannya. Beberapa negara juga memilih untuk membatalkan kedatangannya, seperti Vietnam Selatan beralasan bahwa selain mempertimbangkan isu keamanan, juga beralasan bahwa situasi politik dalam negerinya yang memanas (Anonim Juni 1965a.e:2). Ketidakhadiran sebagian besar delegasi kemungkinan besar disebabkan oleh faktor keamanan yang berisiko tinggi sejak peristiwa pengeboman terjadi. Akibatnya, panitia persiapan KAA Kedua memutuskan untuk menjadwalkan ulang konferensi menjadi pada 5 November pada tahun yang sama (Anonim 1965u:1). Sementara itu, konferensi tingkat Menteri luar negeri rencananya dibuka pada Oktober 1965.

Meskipun pada awalnya Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk melanjutkan konferensi, namun penundaan KAA Kedua disetujui. Persetujuan tersebut disampaikan melalui Soebandrio saat mengadakan pembicaraan yang intensif dengan Menteri Luar Negeri Aljazair, Menteri Luar Negeri Cina (Chen Yi), serta Mahmud Riyad dari Mesir. Usai keputusan penundaan diumumkan, dilaporkan bahwa ratusan diplomat dan jurnalis yang telah terlanjur datang memilih untuk pergi meninggalkan Aljazair (Anonim 1965c:1). Sementara

itu, Presiden Soekarno yang masih berada di Kairo memutuskan mengadakan pembicaraan dengan Chou En Lai dan Nasser yang juga bertolak ke sana. Berdasarkan penuturan Roeslan Abdulgani, Presiden Ayub Khan (Pakistan) juga melibatkan dirinya dalam pembicaraan tersebut (Anonim 1965x:2). Dalam pertemuan tersebut, keempat tokoh sepakat untuk benar-benar menunda KAA Kedua. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Soekarno justru mengajak mereka untuk mensukseskan CONEFO⁸ di Jakarta yang rencananya diselenggarakan pada pertengahan 1966 (Anonim 1965f:1). Sementara para pejabat negara memilih menyetujui penundaan konferensi, di Indonesia justru muncul berita-berita propaganda yang mengatakan bahwa KAA Kedua telah gagal dilaksanakan. Merespons pemberitaan tersebut, maka J. Leimena yang saat itu bertugas sebagai pejabat presiden dan menteri luar negeri (*ad interim*) menegaskan bahwa KAA Kedua bukan gagal dilaksanakan, melainkan hanya ditunda penyelenggaraannya (Anonim 1965t:1).

Optimisme Indonesia masih terlihat dengan adanya pembicaraan mengenai pelaksanaan konferensi pada awal Juli 1965. Menlu Soebandrio mendapat undangan dari Pemerintah Aljazair untuk membahas konferensi ini secara lebih lanjut (Anonim

⁸ CONEFO atau *Conference of the New Emerging Forces* merupakan ide Presiden Soekarno untuk menghimpun negara-negara berkembang ke dalam suatu blok sebagai “tandingan” Blok Barat dan Blok Timur.

1965k:1). Beberapa negara menunjukkan dukungannya atas persiapan konferensi. Menteri Luar Negeri Pakistan Ali Bhutto menyampaikan bahwa KAA Kedua penting dilakukan untuk memberikan forum pada negara-negara Asia Afrika untuk membahas masalah-masalah politik dan ekonominya. Apalagi menurut Bhutto, lembaga internasional seperti PBB tengah berada dalam kondisi yang lemah dan dinilai tidak bisa banyak membantu negara-negara Asia dan Afrika (Anonim 1965r:1). Dukungan juga datang dari pemerintahan Aljazair baru di bawah pimpinan Boumedienne. Komitmen Boumedienne ditunjukkan dengan safari politik yang dilakukan pemerintahannya guna mengajak negara-negara Asia Afrika untuk berpartisipasi dalam KAA Kedua (Anonim 1965g:1). Hal ini terlihat dari perjalanan dari Sayid Abdel Aziz Bouteflika (Menteri Luar Negeri Aljazair) ke Mesir untuk bertemu Nasser pada Agustus 1965 guna saling memperkuat dukungan untuk mengupayakan penyelenggaraan KAA Kedua (Anonim 1965h:12). Upaya diplomasi kembali dilakukan Soebandrio dengan mengadakan safari politik ke beberapa negara Afrika dan negara-negara Arab seperti Irak, Iran, hingga Mali. Selain KAA Kedua, pencarian dukungan atas penyelenggaraan CONEFO menjadi agenda lain Soebandrio.

Jalan panjang menuju KAA Kedua terlihat begitu dinamis. Menjelang November 1965, sebuah kabar yang mengejutkan datang dari Pemerintah Cina. Cina secara tiba-tiba dan sepihak mengajukan proposal penundaan KAA Kedua pada Oktober 1965. Pemerintah

Cina mengajukan empat alasan sebagai dasar penundaan konferensi. Pertama, Pemerintah Cina merasa KAA Kedua belum memiliki ketegasan tujuan, apakah untuk menentang kolonialisme, imperialisme, neokolonialisme Amerika Serikat atau tidak. Alasan kedua adalah kekecewaan Pemerintah Cina atas rencana undangan KAA Kedua kepada Sekretaris Jenderal PBB. Padahal, Cina menganggap PBB sebagai alat imperialisme Amerika Serikat. Alasan ketiga adalah penentangan Cina terhadap kehadiran Uni Soviet yang dinilai tidak perlu diundang karena Uni Soviet memang bukan bagian dari kawasan Asia dan Afrika. Sebelumnya, Cina sempat menyetujui undangan terhadap Uni Soviet meskipun dilakukan secara terpaksa. Adapun alasan terakhir adalah pandangan Cina yang melihat bahwa di antara negara-negara Asia Afrika sendiri masih terdapat konflik. Oleh karena itu, Pemerintah Cina menegaskan bahwa dalam keadaan yang demikian, konferensi hanya akan menimbulkan perpecahan, merusak solidaritas Afro-Asia, merusak semangat Bandung, dan hal ini dinilai menjadi sebuah “rezeki” untuk kaum imperialis (Anonim 1965a.d:4). Saat Cina memberitahukan usulan penundaan KAA Kedua, beberapa negara sebenarnya telah mengkonfirmasi kedatangannya. Setidaknya seluruh negara Arab dan Afrika kecuali Tanzania dan Senegal telah memberikan kabar bahwa mereka akan hadir dalam konferensi. Namun, beberapa negara Asia seperti Kamboja, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Pakistan berubah pikiran dan mengikuti

pendapat Pemerintah Cina (Anonim 1965e:1).

Akhirnya, KAA Kedua benar-benar tidak pernah diselenggarakan. Selain usulan penundaan yang secara mendadak dari Cina yang diikuti beberapa negara lainnya, kondisi internal di kawasan Asia Afrika sendiri tidak memungkinkan untuk mengadakan sebuah konferensi besar. Pemerintah Indonesiapun tidak memiliki ketertarikan untuk melanjutkan upayanya menuju KAA Kedua diakibatkan adanya Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang mengubah peta politik dalam negeri. Gerakan mampu menumbangkan kepemimpinan Presiden Soekarno, tokoh yang bersuara keras tentang KAA Kedua. Sejarawan Peter Kasenda (2017:215) menuliskan “kendati bernafas pendek, G30S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia menandai berakhirnya masa kepresidenan Sukarno sekaligus bermulanya kekuasaan Soeharto”. Sejak peristiwa ini terjadi, situasi di dalam negeri didominasi oleh propaganda kebengisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setidaknya selama Oktober sampai November 1965, propaganda dilakukan untuk menimbulkan ketakutan dan kebencian masyarakat terhadap PKI dan pendukungnya (Kasenda 2017:211). Berkaca pada situasi yang sangat tidak kondusif, maka sejak saat itu Indonesia tidak lagi bersuara mengenai KAA Kedua. Bahkan, kejatuhan Soekarno dari kursi pemerintahan dianggap sebagai akhir dari kiprah Indonesia dalam menghidupkan solidaritas Asia Afrika (McGregor dan Hearman

2017:175). Di sisi lain, dalam kurun waktu yang sama juga terjadi “krisis figur pemimpin” di kancah regional. Beberapa pemimpin negara Afrika seperti Patrice Lumumba dari Kongo, Modibo Keita dari Mali, hingga Abubakar Balewa dari Nigeria misalnya digulingkan dari kursi kekuasaannya (Utama 2017:204). Situasi makin diperparah dengan “hilangnya” tokoh-tokoh sentral dalam KAA seperti Nehru dan Nasser yang meninggal dunia. Dengan demikian, tahun 1965 menjadi tahun penutup dari jalan panjang menuju KAA Kedua yang ternyata tidak pernah bisa diselenggarakan.

D. SIMPULAN

Upaya Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) Kedua tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang legasinya dari KAA Bandung tahun 1955. Selain itu, KAA Kedua dinilai dapat menjadi media untuk menunjukkan citranya sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia sekaligus wadah untuk memperjuangkan kepentingan politik Indonesia baik dalam meraih dukungan dalam misi pembebasan Irian Barat dan misi menentang pembentukan Federasi Malaysia. Usaha Indonesia tersebut tidak terwujud akibat kondisi politik dalam negeri, benturan pandangan antara tokoh-tokoh politik Asia dan Afrika mengenai KAA Kedua, pasang surut kondisi politik negara-negara di kawasan Asia Afrika, hingga konflik antara kelompok ataupun blok yang memperkeruh upaya penyelenggaraan KAA Kedua.

Meskipun demikian, berbagai upaya diplomasi yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam rencana penyelenggaraan KAA Kedua penting untuk dicatat. Selain Soekarno yang memiliki peran sentral dalam rencana KAA Kedua, para diplomat memegang peran penting dalam proses diplomasi baik berupa “diplomasi pribadi”, pertemuan bilateral, ataupun melalui pertemuan multilateral.

Kegagalan KAA Kedua tidak terjadi begitu saja. Perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan KAA Kedua, peristiwa kudeta di beberapa negara, konflik antarnegara dan hilangnya tokoh pembangun wacana solidaritas menjadi bagian dari sebab kegagalan.

Kegagalan KAA Kedua setidaknya dapat menjadi sebuah refleksi untuk negara-negara di abad ke-21 bahwa dalam upaya membentuk solidaritas yang bersifat global tidak semata-mata ditentukan oleh semangat atau keinginan untuk bersatu, namun juga dipengaruhi oleh keberadaan pemimpin-pemimpin nasional yang mampu dan bekerja sama membentuk wacana tentang solidaritas.

DAFTAR SUMBER

- Agung, Ida Anak Agung Gde. 1973. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Den Haag: Mouton & Co.
- ANRI. 1964. *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Seri Produk Hukum 1949-2005*, No. 7782.
- Anonim. 1955. (Tidak Ada Judul). 1955. *The Iraq Times*, November 10, 11.
- _____. 1956a. (Tidak Ada Judul). *Harian Rakjat*, Mei 3.
- _____. 1956b. “Chou En Lai Hendaki KAA j.a.d di Kairo”. *Kedaulatan Rakyat*, Januari 25, 1.
- _____. 1956c. “Konp. AA jang Akan Datang”. *Kedaulatan Rakyat*, April 20, 1.
- _____. 1956d. “Konperensi AA ke 2 Ditunda Sampai Waktu yang Tak Ditentukan. *Pedoman*. Februari 1, 1-2.
- _____. 1958. “Indonesia Perhitungkan Kemungkinan Konp. A.A. II”. *Merdeka*, Juli 31, 1.
- _____. 1961a. (Tidak Ada Judul). *Harian Rakjat*, Juli 7.
- _____. 1961b. (Tidak Ada Judul). *Middle East Record*, 172.
- _____. 1961c. “Indonesia Wants 2nd Bandung”. *The Iraq Times*, Juli 27, 7.
- _____. 1961d. “Presiden April ke Negara2 A.A.AL-Eropa: Konsultasi Utk KAA II Sedang Diadakan”. *Suluh Indonesia*, Februari 13.
- _____. 1962a. “Harapan Semakin Besar Untuk Konp. A.A. Ke-II”. *Merdeka*, Desember 14, 1.
- _____. 1962b. “India Ragu Ttg AA II”. *Merdeka*, Oktober 4, 1.

- _____. 1962c. "Konp. AA II Sesuai dengan Revolusi Iraq". *Merdeka*, Oktober 10, 1.
- _____. 1962d. "Konp. AA ke-II Penting". *Merdeka*, Desember 7, 1-2.
- _____. 1962e. "Palaez Ttg. Konp. AA Kedua". *Merdeka*, Oktober 19, 1.
- _____. 1964a. "KAA II Tak Akan Ditunda". *Merdeka*, November 21, 1.
- _____. 1964b. "Konfrontasi Thd. Malaysia di Segala Bidang Harus Lebih Ditingkatkan". *Merdeka*, November 18, 1.
- _____. 1964c. "Misi Dwikora Dr. Subandrio ke MU PBB: Hadapi Reorganisasi PBB dan Persiapan KAA-II dengan Wakil AA". *Merdeka*, Desember 5, 1.
- _____. 1965a. "Delegasi Indonesia ke KAA II Hari Senin Berangkat". *Duta Masjarakat*, Juni 12, 1.
- _____. 1965b. "60 Negara AA Kutuk Malaysia". *Duta Masjarakat*, Juni 18, 1.
- _____. 1965c. "Afro-Asian Summit Postponement A Setback to Boumedienne". *Baghdad News*, Juni 28, 1.
- _____. 1965d. "Algiers Prepares for Afro-Asian Summit Conf.". *Baghdad News*, Mei 19, 11.
- _____. 1965e. "All Arab States Say 'Yes' to Afro-Asian Summit". *Baghdad News*, Oktober 24, 1.
- _____. 1965f. "Bertekad Bulat Sukseskan CONEFO, Setudju Keputusan Penundaan KAA II". *Duta Masjarakat*, Juni 29, 1.
- _____. 1965g. "Boumedienne Plans Mission to Afro-Asian Countries". *Baghdad News*, Agustus 9, 1.
- _____. 1965h. "Bouteflika Leaves for Home After Talks in U.A.R.". *Baghdad News*, Agustus 23, 12.
- _____. 1965i. "Delegasi Arab Saudi, Mongolia, dan Jordania". *Duta Masjarakat*, Juni 18, 1.
- _____. 1965j. "Delegasi Lewat Paris". *Duta Masjarakat*, Juni 24, 2.
- _____. 1965k. "Dr. Subandrio di Aldjazair Adakan Pembitjaraan Masalah Internasional dan KAA II". *Duta Masjarakat*, Juli 3, 1.
- _____. 1965l. "Duta Besar Asa Bafagih: Usaha-usaha Nekolim Rintangi KAA II Gagal". *Duta Masjarakat*, Mei 19, 1.
- _____. 1965m. "Hadji Soebandrio Tiba di Ethiophia". *Duta Masjarakat*, Juni 18, 1.
- _____. 1965n. "India Sokong Ikut Sertanja "Malaysia" dalam KAA II". *Duta Masjarakat*, Juni 11, 1.
- _____. 1965o. "Indonesia Akui Pemerintah H. Boumidienne". *Duta Masjarakat*, Juni 21, 1.
- _____. 1965p. "Jakarta Mission in Zambia". *The Straits Times*, Januari 28, 2.

- _____. 1965q. "KAA II Harus Dhjadi Konperensi jang Anti-imperialisme". *Duta Masjarakat*, Juni 9, 1-2.
- _____. 1965r. "KAA II Pasti Akan Diadakan dan Sukses Besar". *Duta Masjarakat*, Juli 16, 1.
- _____. 1965s. "KAA II Tingkat Menlu Dibuka Hari Ini". *Duta Masjarakat*, Juni 25, 1.
- _____. 1965t. "KAA Kedua Tidak Gagal, Tetapi Hanja Ditunda Waktu Penjelenggaraannja". *Duta Masjarakat*, Juni 29, 1.
- _____. 1965u. "Konperensi AA Kedua Ditunda Sampai Bulan Nopember". *Duta Masjarakat*, Juni 28, 1.
- _____. 1965v. "Penundaan KAA II Disetujui Menlu Soebandrio". *Duta Masjarakat*, Juni 29, 1.
- _____. 1965x. "Perdjalanan Misi Pres. Sukarno Ke Konp. Aldjazair Sangat Penting". *Duta Masjarakat*, Juli 10, 2.
- _____. 1965y. "Pres. Di Luar Negeri". *Duta Masjarakat*, Juni 28, 1.
- _____. 1965z. "Pres. Nasser dan Ayub Khan Sukseskan KAA II". *Duta Masjarakat*, Juni 19, 1.
- _____. 1965a.a. "Presiden Sukarno Dg Utusan Istimewa Presiden Aldjazair Bitjarakan KAA II". *Duta Masjarakat*, Juni 3, 1 dan 3.
- _____. 1965a.b. "Presiden Sukarno: Biarlah Kalau Negara2 Jang Akui Malaysia Mau Keluar". *Duta Masjarakat*, Mei 24, 1.
- _____. 1965a.c. "Presiden/Pemimpin Besar Revolusi: Nekolim Hendak Gagalkan KAA II di Aldjazair". *Duta Masjarakat*, Juni 16, 1 dan 3.
- _____. 1965a.d. "The Peoples Daily...". *Baghdad News*, Oktober 26, 4.
- _____. 1965a.e. "Urungkan Semua Rentjana KAA II". *Duta Masjarakat*, Juni 24, 2.
- _____. 1965a.f. "Wakil PM. I/Menlu Dr. Subandrio Ke Tokkio: Untuk Bitjarakan Masalah M'Sia, KAA II, dan Ekonomi-Perdagangan Dg Djepang". *Duta Masjarakat*, Mei 20, 1.
- Azar, E.E. 1972. "Conflict Escalation and Conflict Reduction in An International Crisis: Suez 1956". *The Journal of Conflict Resolution*. 16 (2):183-201.
- Berridge, G. R., dan Alan James. 2003. *A Dictionary of Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bilqis, Hikmatul. 2019. "Kebijakan Gamal Abdul Nasser tentang Nasionalisasi Terusan Suez dan Dampaknya terhadap Mesir". Skripsi. Jurusan S-1 Sejarah dan Peradaban Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Dinkel, Jurgen. 2018. *The Non-Aligned Movement: Genesis, Organization and Politics (1927-1992)*. Leiden: Brill.
- Kasenda, Peter. 2017. *Sukarno, Marxisme, dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi*

- Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Legge, John D. 2003. *Sukarno: A Political Biography*. Singapura: Archipelago Press (Didier Millet Pte Ltd).
- Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- McDermott, Rose. 1998. *Risk Taking in International Politics: Prospect Theory in American Foreign Policy*. Michigan: Michigan University Press.
- McGregor, Katharine, dan Vanessa Hearman. 2017. "Challenging the Lifeline of Imperialism: Reassessing Afro-Asian Solidarity and Related Activism in the Decade 1955–1965", dalam Luis Eslava, Michael Fakhri, dan Vasuki Nesiah (ed.), *Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Millar, T.B., dan J.D.B. Miller. 1965. "Afro Asian Disunity: Algiers, 1965." *Australian Outlook*. 19(3):306-321.
- Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri. 1971. *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri, 1945-1970*. Jakarta: Percetakan Offset KAWAL.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 1996. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*. Jilid II. Jakarta: Deplu RI.
- Pauker, Guy J. 1965. "The Rise and Fall of Afro-Asian Solidarity". *Asian Survey*. 5(9):425-432.
- Pedoman*. 1 Februari 1956. Hlm.1-2.
- Roy, S. L. 1995. *Diplomasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schaefer, Bernd dan Baskara T. Wardaya. 2013. *1965: Indonesia and The World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid II. Jakarta: Panitia Penulisan Di Bawah Bendera Revolusi.
- Tista, Paul. 1989. *Supeni: Wanita Utusan Negara*. Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Utama, Wildan Sena. 2017. *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Weinstein, Franklin B. 1965. "The Second Asian-African Conference: Preliminary Bouts." *Asian Survey*. 5(7):359-373.
- Wulandari, Ayu. 2021. "Di Balik Meja Perundingan: Tiga Diplomat Perempuan dalam Misi Diplomasi Indonesia (1946-1960an)". Skripsi. Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Zhou, Taomo. 2019. *Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1967*. Jakarta: Kompas.